

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TRIWULAN II



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja triwulan II tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja triwulan II Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 31 Juli 2025

**KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN dan ASET
DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN**


AHMAT HAFID, SE, MM
NIP. 19690131 199003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DARTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	6
D. Landasan Hukum.....	9
E. Sistematika	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	49
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
BAB IV PENUTUP.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	12
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama.....	13
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025	15
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	16
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Tahun 2025	17
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	25
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	26
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	32
Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	33
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota Lain.....	34
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	36
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	38
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	50
Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan

dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Triwulan II Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, Kepala Badan mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi :

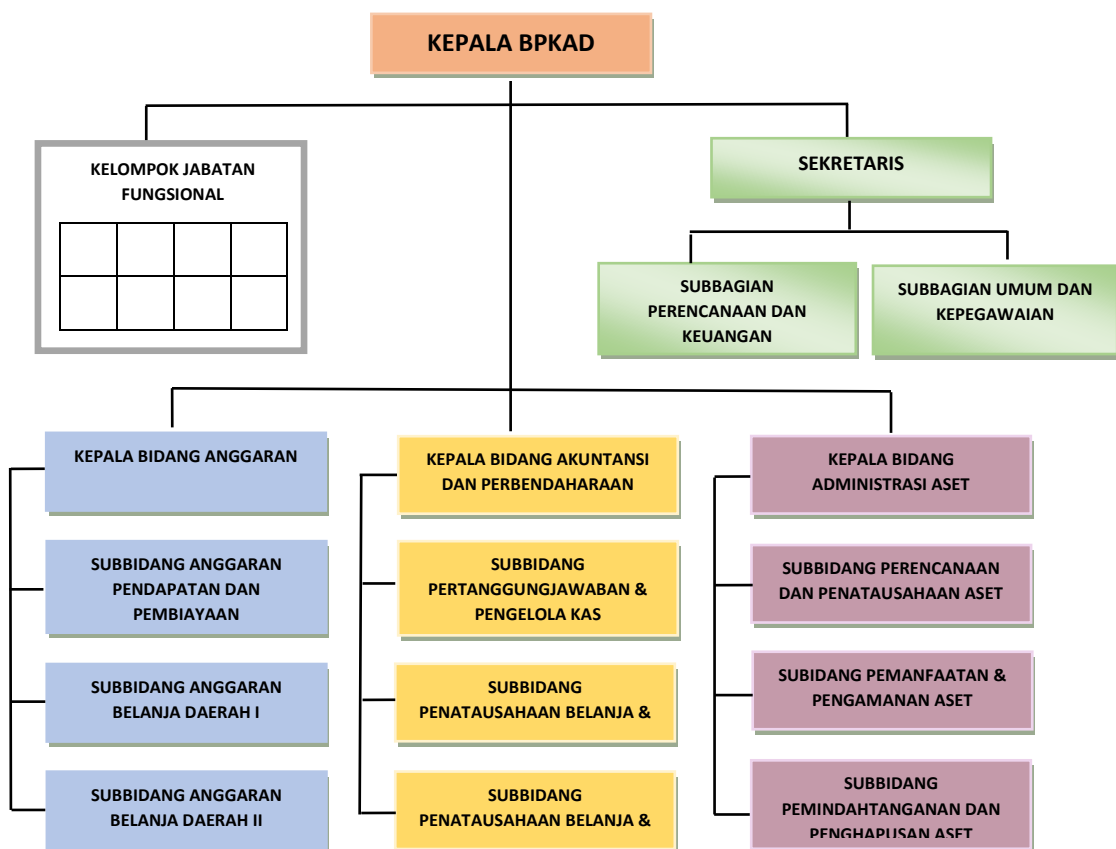
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Badan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2) Sub Bidang Anggaran Belanja Daerah I;
 - 3) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Akuntansi Perbendaharaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Kas;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan Belanja dan Verifikasi I;
 - 3) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Administrasi Aset, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset;
 - 3) Sub koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



Uraian tugas dari susunan struktur organisasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 5) Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- 6) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- 7) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- 9) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 10) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 11) Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran, mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Anggaran;
- 2) Penyiapan bahan inventarisasi, mendistribusikan dan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;

- 3) Penyiapan bahan inventarisasi, menganalisa dan mengolah bahan serta data-data pendapatan dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan memverifikasi RKA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- 5) Penyiapan bahan penyusunan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait pendapatan dan pembiayaan;
- 6) Penyiapan bahan penyusunan anggaran kas pendapatan dan pembiayaan;
- 7) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD;
- 8) Penyiapan bahan koordinasi dan kompilasi bahan terkait dengan pendapatan dan pembiayaan untuk jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 9) Penyiapan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
- 10) Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
- 11) Penyiapan bahan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah;
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi di bidang Akuntansi dan Perbendaharaan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
- 2) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;

- 3) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- 4) Pengelolaan utang dan piutang daerah;
- 5) Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
- 6) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 7) Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Administrasi Aset

Bidang Administrasi Aset mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi di bidang Administrasi Aset. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Administrasi Aset mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Administrasi Aset;
- 2) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 3) Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- 4) Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- 5) Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2024-2026 sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam tata kelola keuangan daerah diperlukan sesuai tuntutan perubahan. Sampai saat ini masih dirasakan kurang mampu menerima beban kerja yang diberikan sehingga diperlukan penambahan wawasan dan pengetahuan melalui pengiriman personil untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, pendidikan dan pelatihan yang terkait tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan;

- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan sangat didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan secara berkesinambungan berusaha untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan terutama tempat kerja. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari gudang arsip atau penyimpanan dokumen, kamera, *computer, printer, scanner* dan pemeliharaan *air conditioner (ac)* dan kebutuhan lainnya. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bertujuan untuk mendorong kinerja pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan ini dapat terus ditingkatkan;

- 3) Kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Kurang tertibnya administrasi dari petugas pengelola keuangan dan barang milik daerah mengakibatkan terganggunya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan kinerja pada sub kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah di setiap Perangkat Daerah khususnya dalam pensertifikatan aset milik daerah. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan sistem administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (BMD);

4) Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah

Beban kerja yang tinggi dan kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di BPKAD Kabupaten Bangkalan mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal sehingga dibutuhkan sumber daya manusia baru guna memudahkan tugas dan fungsi BPKAD sebagai SKPD sekaligus PPKD Kabupaten Bangkalan;

5) Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah

Sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah masih belum dilakukan integrasi dengan menggunakan sistem aplikasi yang basis datanya berbeda. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah maka diperlukan integrasi aplikasi keuangan dan barang milik daerah;

6) Belum terwujudnya sistem pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang berbasis teknologi informasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki tugas untuk melayani dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah untuk SKPD di lingkungan Kabupaten Bangkalan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan adanya pengembangan teknologi informasi guna mempersingkat waktu pelayanan. Sehingga pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dapat lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

Perumusan Isu Strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2024-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi penggunaan sistem pada SIPD penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.
2. Perlu adanya Peningkatan kualitas SDM dalam proses penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
3. Perlu adanya penguatan koordinasi penggunaan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terintegrasi dengan SIPD serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 25 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
5. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan II Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah revidi
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai kinerja Tahun 2024-2026 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis. Untuk mencapai keberhasilan kinerja, perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,50	2,30	2,00
			Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1.2 Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70,00	75,00	80,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat	92,00	93,00	95,00

Sumber : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah periode 2024-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
			Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD		Opini BPK atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/ Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/ Tidak Wajar/ Tidak Menyatakan Pendapat	LKPD

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			
			Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Satuan	Pengukuran terhadap tahapan penyusunan APBD apakah telah sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai / Tidak Sesuai		Laporan Evaluasi Kinerja
	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Satuan	Pengukuran nilai SiLPA terhadap realisasi belanja APBD	Nilai realisasi SiLPA	Laporan Evaluasi Kinerja	
				Total belanja APBD tahun sebelumnya		
	Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	Persentase	Pengukuran terhadap kelengkapan dokumen Barang Milik Daerah	Σ Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	X 100%	Laporan Evaluasi Kinerja
				Total Barang Milik Daerah		
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Satuan	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD		LHE Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Pengukuran kinerja pelayanan kesekretariatan berdasarkan penilaian eksternal	Nilai pada <i>e-Sukma</i>		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2025
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Satuan	Sesuai
				Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Satuan	2,30
				Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	Persentase	100%
		1.2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Satuan	75,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,00

Sumber : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan

tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,30
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	93,00

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase OPD yang Melaksanakan Tatakelola Keuangan Sesuai Ketentuan	100%
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu/Sesuai Ketentuan	100 %
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	100%
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dokumen
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	1 Laporan

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	100%
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang tersusun	100%
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	14 Laporan
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	161 orang

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah	100%
5.02.03.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	100%
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan PD terlayani tepat waktu	100%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan	4 Laporan

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		/Semesteran SKPD	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik	100%
5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100%
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan	100%
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah triwulan II Tahun 2025 ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah triwulan II tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi	LKPD
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai	-	-	-	Laporan Evaluasi Kinerja
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,30	0,05	197,8%	Sangat tinggi	Laporan Evaluasi Kinerja
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	58,54%	58,54%	Rendah	Laporan Evaluasi Kinerja
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75,00	-	-	-	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
							Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	93,00	84,53	91%	Sangat Tinggi	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
Rata-rata Capaian					74,56%	Sedang	

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi target dari tujuan yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 100%. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Faktor pendukung tercapainya kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya manusia. Kualitas SDM dalam memberikan kebijakan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM sangat dibutuhkan dengan keikutsertaan dalam bimbingan, workshop dan pelatihan.
2. Penyusunan rencana yang terukur. Proses perencanaan dilaksanakan dengan dasar analisis yang tepat, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur.
3. Kepatuhan terhadap peraturan dan Standar Akuntansi Pemerintah. Bidang terkait patuh dalam memenuhi permintaan data, melakukan koreksi dan verifikasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan dan standar yang berlaku.
4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK. Temuan-temuan BPK didiskusikan dan ditindaklanjuti sesuai hasil diskusi bersama.
5. Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan transparansi sehingga tidak terjadi pemborosan dan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
6. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Pemantauan secara rutin terhadap progres kinerja untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan program berjalan sesuai dengan rencana.

Penyusunan laporan kinerja ini masih mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Hal ini dikarenakan dokumen Renstra Tahun 2025–2029 dan Renja Perubahan Tahun 2025

belum disahkan hingga proses penyusunan laporan ini dilakukan, sehingga belum dapat dijadikan dasar perencanaan dan evaluasi kinerja tahun berjalan.

Adapun rata-rata capaian dari Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan dari 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan pada triwulan II Tahun 2025 adalah 74,56% atau Sedang. Adapun tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja pada 2 sasaran dijelaskan sebagai berikut :

1) Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

a. Indikator Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran 2026. Pada indikator ini belum ada capaian karena belum sampai pada periode pelaksanaan.

b. Indikator Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan LKPD TA 2024 diperoleh nilai SiLPA sebesar Rp2.459.309.778.126,45 dengan realisasi belanja sebesar Rp2.273.503.852.824 sehingga diperoleh rasio sebesar 0,05. Adapun perhitungan capaian kinerja dijelaskan di bawah ini

Konsep :

Apabila Realisasi (R) = Target (T) = 2,3 diperoleh Capaian (C) = 100%

Apabila $R = 2,3 \rightarrow C = 100\%$

Apabila $R \leq 2,3 \rightarrow C \geq 100\%$

Apabila $R \geq 2,3 \rightarrow C \leq 100\%$

Pergerakan (P) adalah selisih realisasi dari target

Perhitungan :

- **Realisasi (R)**

$$R \leq 2,3 \rightarrow C \geq 100\%$$

$$0,05 \leq 2,3 \rightarrow C \geq 100\%$$

- **Persamaan 1 (R = T)**

$$R = 2,3 \rightarrow C = 100\%$$

$$\frac{2,3}{2,3} \times 100\% = 100\% \dots\dots\dots(1)$$

- **Persamaan 2 (P)**

$$\frac{2,3-0,05}{2,3} \times 100\% = \frac{2,25}{2,3} \times 100\%$$

$$= 97,8\% \dots\dots\dots(2)$$

- **Capaian (C)**

$$\left(\frac{2,3}{2,3} \times 100\%\right) + \left(\frac{2,25}{2,3} \times 100\%\right) = 100\% + 98\%$$

$$= 197,8\%$$

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja diperoleh hasil sebesar 197,8%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa BPKAD telah berhasil mencapai target sebesar 100% bahkan telah melebihi target sebesar 97,8%. Persentase yang tinggi diperoleh karena penetapan target yang tinggi sehingga mudah untuk mencapai target tersebut. Hasil persentase capaian kinerja juga menunjukkan bahwa berdasarkan LKPD TA 2024, Kabupaten Bangkalan telah berhasil mengalokasikan penganggaran dan menyerap anggaran dengan baik sehingga perbandingan SiLPA terhadap total belanja hanya sebesar 0,05 dan diperoleh capaian kinerja yang tinggi. Beberapa faktor pendukung tercapainya kinerja adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi yang intens dengan pihak eksternal seperti Kemendagri, Kemenkeu, Direktorat Jenderal Pajak, seluruh OPD dan pihak berkaitan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah
2. Memberikan surat teguran pada SKPD yang sering terlambat atau terlambat dalam progres pengelolaan keuangan dan aset daerah

c. Indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal

Pada triwulan II tahun 2025 diketahui data barang milik daerah, sebagai berikut:

- Aset/Bidang	
Bersertifikat	= 667
<u>Belum bersertifikat</u>	<u>= 1800</u> +
Jumlah Aset/Bidang	= 2467
- Kendaraan	
Roda 2	= 1458
Roda 3	= 42
<u>Roda 4</u>	<u>= 387</u> +
Jumlah Kendaraan	= 1887

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja, capaian pada indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

Realisasi :

$$\frac{\sum \text{Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal}}{\text{Total Barang Milik Daerah}} \times 100\% = \frac{2540}{4339} \times 100\% = 58,54\%$$

Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\% = \frac{58,54\%}{100\%} \times 100\% = 58,54\%$$

Adapun rincian dari barang milik daerah yang terdokumentasi legal adalah sebagai berikut :

- Aset/Bidang	$= \frac{667}{2467} \times 100\%$ $= 27\%$
- Kendaraan	$= \frac{1872}{1872} \times 100\%$ $= 100\%$

Rendahnya capaian kinerja pada indikator ini disebabkan karena rendahnya realisasi aset/bidang yang bersertifikat. Adapun penyebab rendahnya realisasi aset/bidang bersertifikat diantaranya disebabkan oleh:

1. Tingginya jumlah aset/bidang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses dokumentasi legal.

2. Perjalanan pada saat proses pengecekan fisik atau survey aset/bidang cukup menghabiskan jam kerja karena jarak yang cukup jauh.
3. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat berbagi tugas untuk melakukan pekerjaan di kantor dan di lapangan.

2) Sasaran 2 : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan

a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pelaksanaan review pada akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2025. Nilai SAKIP Perangkat Daerah terbit pada bulan Oktober Tahun 2025.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil survey eksternal yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Kebijakan Publik, pada triwulan II Tahun 2025 diperoleh nilai *e-sukma* sebesar **84,53 atau Baik**. Adapun capaian pada realisasi indikator kinerja sebesar **91% atau Tinggi**. Berikut adalah beberapa faktor pendukung capaian kinerja :

1. Aktif berkoordinasi dengan seluruh OPD dalam rangka pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
2. Responsif dalam menerima beberapa pertanyaan dan permasalahan yang dialami oleh OPD
3. Memiliki kotak saran atau pengaduan online melalui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPoQ1VPOZwtQ7YRZHX870RYxPMY-WLs28yx398R_qua6ZzgQ/viewform?usp=sharing yang bisa diakses oleh siapa saja karena ditempel di pintu masuk instansi sehingga setiap kritikan dan saran diterima dengan baik guna meningkatkan pelayanan
4. Penggunaan WA center dalam rangka mempermudah koordinasi dengan OPD dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat
5. Melakukan realokasi dan refocusing berdasarkan penilaian kinerja dengan memperhatikan kebutuhan

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun peralihan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024	Tahun 2026	Tahun 2025 (Triwulan II)		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	-	WTP	WTP	100%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai	-	Sesuai	-	-
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,07	-	2,30	0,05	197,8%
2		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	58%	-	100%	58,54%	58,54%
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	-	75,00	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,95	-	93,00	84,53	91%

Berdasarkan tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD pada tahun 2025 mencapai target sebesar 100%. Capaian tersebut sama apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh konsistensi atas kepatuhan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Pada sasaran ke-1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - a. Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu, belum dapat dibandingkan
 - b. Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya pada LKPD Tahun 2024 mencapai target sebesar 197,8%. Capaian tersebut

mengalami kenaikan sebesar 0,6% apabila dibandingkan dengan capaian atas LKPD Tahun 2023 yaitu sebesar 197,2% dengan realisasi kinerja sebesar 0,07.

- c. Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal dengan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebesar 58,54% mengalami peningkatan dibandingkan realisasi triwulan II tahun 2024 dengan realisasi dan capaian kinerja sebesar 58%.
3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan
 - a. Nilai Sakip Perangkat Daerah, belum dapat dibandingkan
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian sebesar 91% pada triwulan II tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,84% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 90,16%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh penggunaan media sosial secara aktif sebagai sarana dokumentasi dan publikasi kinerja serta sebagai sarana komunikasi yang dapat diakses masyarakat luas untuk memberikan saran dan kritik yang membangun.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja triwulan II Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	Sesuai	0
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,05	2,00	197,5%
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	58,54%	100%	58,54%
2	Meningkatnya Tata Kelola	Nilai Sakip Perangkat	-	80,00	0

	Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Daerah			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,53	95,00	89%
Rata-rata tingkat kemajuan capaian kinerja					74,17%

Pada tabel 3.4 dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kemajuan capaian indikator sasaran pada triwulan II tahun 2025 terhadap sasaran akhir RENSTRA (2026) adalah 74,17%. Tingginya rata-rata tingkat kemajuan capaian sasaran didukung oleh tingginya capaian kinerja pada salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya sebesar 197,5%. Indikator kinerja persentase barang milik daerah yang terdokumentasi legal memiliki tingkat kemajuan sebesar 58,54% karena tingginya barang milik daerah yang dimiliki. Adapun sasaran Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat memiliki tingkat kemajuan capaian target sebesar 89%.

Perbandingan realisasi kinerja triwulan II tahun 2025 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi triwulan II Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	-	-
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,05	-	-
		Persentase Barang Milik Daerah yang	58,54%	99,96%	59%

		terdokumentasi legal			
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	87,9	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,53	-	-

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 menyebutkan bahwa tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 poin ke 4 adalah mewujudkan Pemerintahan yang baik terdiri dari beberapa sasaran strategis di antaranya sebagai berikut:
 - a. Sasaran meningkatnya tata kelola Pemerintahan dan SDM Aparatur yang berkualitas dengan salah satu indikatornya yaitu opini BPK. Indikator tersebut selaras dengan tujuan BPKAD Kabupaten Bangkalan yaitu meningkatkan kinerja pemerintah melalui kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD.
 - b. Sasaran meningkatnya kualitas kebijakan dan penyaluran administratif dengan salah satu indikatornya yaitu Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Indikator tersebut selaras dengan sasaran BPKAD Kabupaten Bangkalan yaitu meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 menyebutkan bahwa tujuan BPKAD adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sasaran dari tujuan tersebut adalah terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai dengan ketentuan dan akuntabel. Salah satu indikator utama untuk mencapai sasaran ini adalah persentase aset tetap yang terdokumentasi secara legal. Indikator ini sejalan dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang Terdokumentasi Legal, yang termasuk dalam sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	Berhasil mencapai target	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai	-	-	Belum mencapai target	
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,30	0,05	197,8%	Berhasil melebihi target	
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	58,54%	58,54%	Belum mencapai target	
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75,00	-	-	Belum mencapai target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	93,00	84,53	91%	Belum mencapai target	

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tujuan meningkatkan kinerja pemerintah melalui kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD **berhasil mencapai target**. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
 - Melakukan monitoring penjurnalan realisasi pendapatan dan belanja mulai dari penyusunan Laporan Semesteran

- Koordinasi yang intens dengan OPD dalam rangka menjawab temuan-temuan BPK
 - Memenuhi permintaan BPK mengenai pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang wajar dan tepat waktu
 - Melakukan diskusi yang membangun untuk mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Menyusun anggaran secara transparan, partisipatif, dan akuntabel
- 2) Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator:
- a) Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu **belum mencapai target** karena belum sampai pada periode pelaksanaan
 - b) Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya **berhasil melebihi target**. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
 - Monitoring penginputan pendapatan dan pengajuan pencairan dana belanja setiap bulan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi
 - Menunda proses verifikasi pengajuan pencairan dana bagi OPD yang terlambat dalam memenuhi permintaan data untuk pendapatan ataupun belanja
 - Aktif dan ikut serta dalam acara rapat, koordinasi, rekonsiliasi, bimbingan atau pelatihan yang berkaitan dengan keuangan dan system keuangan
 - c) Persentase barang milik daerah yang terdokumentasi legal **belum mencapai target**. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
 - Meningkatkan pagu anggaran dalam rangka proses sertifikasi aset daerah
 - Melakukan pembagian tugas pekerja lapangan dan di kantor dengan memperhatikan skala prioritas
 - Aktif dan ikut serta dalam acara rapat, koordinasi, rekonsiliasi, bimbingan atau pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah
 - Melakukan rapat dan koordinasi yang intens dengan BPN dalam rangka peralihan penerbitan sertifikat menjadi sertifikat elektronik

3) Sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keuangan dengan indikator :

a) Nilai SAKIP perangkat daerah **belum mencapai target** karena belum sampai pada periode pelaksanaan

b) Indeks kepuasan masyarakat sudah baik meskipun **belum mencapai target**.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%				
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	-	Menunjang
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	197,8%		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang tersusun tepat waktu/ sesuai ketentuan	12%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				SKPD			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	100%	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	50%	
				Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah		
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	100%	
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan	50%	
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	50%	
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
				Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	50%	
		Persentase Barang Milik Daerah yang	58,54%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK	Persentase PD yang Tertib Administrasi	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
		terdokumentasi legal		DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah		
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang tersusun	14%	Menunjang
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	40%	
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	50%	
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	40%	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50%	
				Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	100%	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Dokumen RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33%	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan PD terlayani tepat waktu	67%%	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	50%	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik	47%	Menunjang
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50%	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani	-	
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan	49%	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50%	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	56%	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50%	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50%	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi	50%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50%	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	48%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	77%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	61%	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
				dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya meliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		

Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa semua indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2025 telah mencapai target dengan rata-rata capaian kinerja dari semua program adalah 74,56%. Adapun rincian capaian kinerja per program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dalam Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari indikator persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu belum dapat dilaksanakan dan indikator persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP dengan capaian sebesar 100% yang menunjang tercapainya target program. Hal ini berdasarkan jumlah OPD yang telah menyusun laporan keuangan SKPD TA. 2024 sesuai SAP.

Pada triwulan II Tahun 2025, Bidang Anggaran menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan dalam proses penyusunan dokumen anggaran, seperti KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan DPA, yang umumnya disebabkan oleh lambatnya penginputan data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam pemahaman teknis sebagian OPD terhadap regulasi terbaru dan pengoperasian sistem penganggaran berbasis SIPD, yang berdampak pada kualitas dan ketepatan penyusunan anggaran. Tingginya beban kerja pada periode yang berdekatan antara penyusunan APBD dan APBD Perubahan juga menjadi tantangan tersendiri bagi tim anggaran.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Bidang Anggaran akan berfokus pada penyusunan timeline dan daftar periksa (checklist) penginputan anggaran secara digital akan diterapkan sebagai alat kontrol dan pengingat bagi OPD untuk menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Koordinasi dan pendampingan langsung oleh tim anggaran juga akan diperkuat, khususnya pada tahapan-tahapan krusial dalam penyusunan APBD maupun perubahan APBD, guna meminimalkan keterlambatan dan kesalahan teknis.

Pada periode pelaporan ini pula, Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan juga menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu kendala yang kerap terjadi adalah pelaksanaan operasional harian dalam bentuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang secara umum masih berjalan normal dan sesuai prosedur. Namun, proses pelayanan pembayaran sering mengalami keterlambatan akibat performa aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang lambat dan tidak stabil. Kendala teknis ini berdampak pada efektivitas layanan pencairan dan berpotensi menunda pemenuhan kewajiban belanja daerah. Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam administrasi penatausahaan, sehingga mengakibatkan perlunya koreksi atau revisi berulang pada dokumen pelaporan keuangan. Seperti yang terjadi pada bulan Juni 2025, akibat gangguan pada sistem SIPD yang menyebabkan data transaksi harian untuk pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak otomatis tersinkronisasi ke dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sebagai langkah darurat, proses unggah data dilakukan secara manual, yang meskipun menyelesaikan sebagian kendala, tetap berisiko menimbulkan keterlambatan dan potensi kesalahan input. Permasalahan lainnya yaitu proses rekonsiliasi pajak semester I masih menemui kendala teknis karena aplikasi SIPD RI dan Coretax belum mampu menyajikan data pajak secara terperinci berdasarkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Hal ini menyebabkan petugas harus melakukan rekonsiliasi secara manual menggunakan spreadsheet, yang meningkatkan risiko kesalahan dan membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, terdapat beberapa transaksi pajak dari SKPD yang belum dibayarkan pada semester I dan baru dapat direalisasikan pada bulan Juli 2025. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kas daerah dan pemahaman akuntansi berbasis akrual turut menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi fungsi perbendaharaan dan akuntansi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan akan meningkatkan koordinasi secara intensif dengan Tim Teknis SIPD Kementerian Dalam Negeri untuk melaporkan permasalahan performa sistem dan mendorong perbaikan dari sisi infrastruktur. Di tingkat internal, akan disusun jadwal layanan yang adaptif terhadap kemungkinan keterlambatan sistem, serta memastikan petugas penatausahaan memiliki kesiapan teknis dan alternatif langkah kerja ketika terjadi gangguan guna memastikan kualitas dan ketepatan pelaporan keuangan. Sebagai upaya penguatan kapasitas, penguatan pengawasan internal terhadap pembayaran pajak di SKPD juga akan dilakukan, termasuk monitoring realisasi pembayaran agar tidak kembali terjadi penundaan pembayaran pajak.

2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dari Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang telah mencapai target dengan capaian sebesar 100% sehingga menunjang tercapainya target dari program ini. Hal ini berdasarkan jumlah OPD yang melakukan pengadministrasian barang milik daerah dengan tertib mulai dari proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sampai penyampaian Laporan Barang Milik Daerah.

Bidang Administrasi Aset menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan penertiban dan legalisasi aset milik daerah. Salah satu permasalahan utama adalah masih rendahnya jumlah aset atau bidang tanah yang telah bersertifikat, yang disebabkan oleh tingginya jumlah aset yang harus dikelola, keterbatasan waktu, dan hambatan teknis dalam proses pendataan maupun verifikasi lapangan. Di samping itu, proses pendokumentasian aset secara tertib dan legal masih belum optimal, serta belum terintegrasinya sistem pengelolaan barang milik daerah dengan sistem keuangan daerah turut memperlambat proses pemutakhiran data dan pelaporan aset.

Sebagai rencana tindak lanjut, Bidang Aset akan memperkuat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan OPD pengguna barang guna mempercepat proses pensertifikatan aset, termasuk mendorong pendataan ulang secara sistematis. Penyusunan roadmap pendataan dan legalisasi aset juga akan menjadi

prioritas strategis yang dilaksanakan secara bertahap dan terukur, guna mendukung proses penatausahaan aset yang lebih akurat, efisien, dan akuntabel.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah indeks kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah yang telah berhasil melebihi target dengan nilai sebesar 93,42 dan capaian sebesar 113,93% dari target sehingga menunjang tercapainya target dari program ini. Hal ini berdasarkan terpenuhinya seluruh kegiatan dan kebutuhan dalam penunjang urusan pemerintahan daerah.

Bidang Sekretariat sebagai unit pendukung utama pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga mengalami sejumlah kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan utama adalah ketidakseimbangan beban kerja antar subbagian, terutama antara pelayanan umum, perencanaan dan evaluasi, administrasi kepegawaian, serta pengelolaan anggaran internal. Selain itu, sistem dokumentasi internal yang belum sepenuhnya terdigitalisasi menyebabkan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan surat-menyurat, arsip, dan pelaporan keuangan. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang layanan internal juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas kerja sekretariat.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Bidang Sekretariat akan melakukan peninjauan kembali terhadap beban kerja masing-masing subbagian dan merumuskan strategi redistribusi tugas secara proporsional berbasis analisis beban kerja. Selanjutnya, penguatan sistem administrasi digital melalui implementasi sistem e-arsip, e-office, dan sistem informasi kepegawaian akan dikembangkan untuk menciptakan tata kelola yang lebih tertib dan efisien. Selain itu, upaya peningkatan sarana prasarana pendukung operasional kantor akan dilakukan secara bertahap melalui pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas.

Sebagai bentuk komitmen terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja aparatur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan melakukan penyesuaian jadwal apel pagi yang semula dilaksanakan

pukul 07.30 WIB, dimajukan menjadi pukul 07.15 WIB. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin waktu, membangun budaya kerja yang lebih tertib, serta memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas bidang sejak awal jam kerja. Selain itu, kegiatan apel yang dilakukan lebih awal juga menjadi media pembentukan karakter pegawai, penyampaian arahan pimpinan, dan penguatan nilai-nilai integritas serta pelayanan publik.

Di sisi lain, BPKAD Kabupaten Bangkalan juga tengah melakukan pembaruan terhadap sistem layanan informasi publik melalui perbaikan website resmi instansi. Proses ini diawali dengan penataan ulang domain utama yang sebelumnya tidak aktif, kemudian dilanjutkan dengan pembaruan desain antarmuka, optimalisasi konten, serta penyesuaian terhadap standar keterbukaan informasi publik dan kemudahan akses masyarakat. Langkah ini sejalan dengan semangat transparansi, akuntabilitas, serta transformasi digital pelayanan pemerintah daerah. Website yang aktif dan informatif diharapkan dapat menjadi salah satu kanal komunikasi utama antara BPKAD dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	417.137.182.883,00	210.282.716.254,00	50,41%
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.300.000.000,00	364.803.500,00	28,06%
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100.000.000,00	10.722.650,00	10,72%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	99.999.900,00	24.809.413,00	24,81%
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	415.637.182.983,00	209.882.380.691,00	50,50%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	820.000.000,00	271.656.200,00	33,13%
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	820.000.000,00	271.656.200,00	33,13%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.602.203.781,00	23.190.624.177,00	50,85%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.971.200,00	0,00	0,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.243.262.989,00	21.340.380.791,00	53,03%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.763.750,00	760.000,00	13,19%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	248.841.692,00	0,00	0,00%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	332.802.450,00	138.740.145,00	41,69%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.513.097.300,00	1.678.075.631,00	37,18%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.464.400,00	32.721.610,00	13,22%
JUMLAH		463.559.386.664,00	233.744.996.631,00	50,42%

Berdasarkan tabel 3.8 dapat diketahui bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 3 program yang terdiri dari 12 kegiatan dan 56 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp463.559.386.664,00 Adapun realisasi anggaran BPKAD sampai dengan triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar Rp233.744.996.631,00 atau 50,42% dari pagu anggaran yang ditetapkan dengan sisa pagu sebesar Rp229.814.390.033,00. Rincian anggaran per program dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui 4 kegiatan yang terdiri dari 25 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp417.137.182.883,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp210.282.716.254,00 atau memperoleh capaian sebesar 50,41% dari pagu yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp206.854.466.629,00

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2025 terdiri dari 1 kegiatan dengan 6 sub kegiatan dimana pelaksanaan program ini menggunakan pagu sebesar Rp820.000.000,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp271.656.200,00 atau 33,13% dari pagu yang ditetapkan sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp548.343.800,00

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp45.602.203.781,00 dan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp23.190.624.177,00 atau capaian yang diperoleh sebesar 50,85% sehingga terdapat anggaran sisa sebesar Rp22.411.579.604,00

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	463.559.386.664,00	233.744.996.631,00	50,42%	-
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				417.957.182.883,00	121.047.067.152,00	28,96%	-
	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai	-	-	1.300.000.000,00	364.803.500,00	28,06%	-

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Esisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,30	0,05	197,8%	415.837.182.883,00	120.410.607.452,00	28,96%	-
	Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	58,54%	58,54%	820.000.000,00	271.656.200,00	33,13%	-
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan				45.602.203.781,00	23.744.996.631,00	52,07%	-
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	75,00	-	-	10.971.200,00	0,00	0,00%	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,00	84,53	91%	45.591.232.581,00	23.190.624.177,00	50,87%	-

Berdasarkan tabel 3.9 dapat dilihat bahwa sampai triwulan II Tahun 2025 capaian realisasi anggaran dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah 50,42%. Namun, tingkat efisiensi belum dapat dihitung karena capaian kinerja belum dapat ditentukan sepenuhnya. Adapun capaian atas realisasi anggaran dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keuangan dan tingkat efisiensi pada masing-masing sasaran dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki realisasi anggaran sebesar 28,96%. Berdasarkan indikator kinerja dijelaskan seperti di bawah ini :

A. Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu

Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan 12 sub kegiatan. Realisasi anggaran sampai pada triwulan II Tahun 2025 pada indikator ini sebesar 28,06%. Adapun capaian kinerja dan tingkat efisiensi belum dapat ditentukan karena belum sampai pada periode pelaksanaan kegiatan yang menjadi indikator kinerja pada sasaran ini.

B. Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan :

- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan 7 sub kegiatan
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan 3 sub kegiatan
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 3 sub kegiatan

Capaian kinerja pada indikator sasaran ini adalah sebesar 197,8% dengan realisasi anggaran sampai pada triwulan II Tahun 2025 sebesar 28,96% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan karena diukur berdasarkan penyusunan LKPD TA 2024 yang dilaksanakan di Tahun 2025. Sedangkan realisasi anggaran masih rendah karena diukur berdasarkan realisasi anggaran dalam proses penyusunan LKPD TA 2025. Adapun tingkat efisiensi akan dinilai pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui efisiensi anggaran yang sebenarnya.

C. Persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah didukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 6 sub kegiatan. Pada triwulan II Tahun 2025 capaian realisasi kinerja pada indikator ini adalah 59% dan realisasi anggaran sebesar 33,13%. Adapun tingkat efisiensi akan dinilai pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui efisiensi anggaran yang sebenarnya.

2. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan memiliki realisasi anggaran sebesar 52,07%. Berdasarkan indikator kinerja dijelaskan seperti di bawah ini :

A. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP terbit pada bulan Oktober 2025 sehingga capaian kinerja belum dapat dinilai. Adapun anggaran pada indikator ini melekat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yaitu pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 4 sub kegiatan. Karena terbatasnya anggaran, pada triwulan II Tahun

2025 kegiatan ini dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran sehingga tidak ada realisasi yang dapat dilaporkan. Namun pemenuhan laporan dan dokumen dikerjakan sebagaimana mestinya.

B. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota pada kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 7 sub kegiatan
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 sub kegiatan
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 sub kegiatan

Capaian realisasi anggaran pada sasaran ini adalah 50,87% dengan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2025 ini sebesar 91%. Adapun tingkat efisiensi akan dinilai pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui efisiensi anggaran yang sebenarnya. Pelaksanaan kegiatan pada Program ini adalah belanja rutin yang dilaksanakan setiap bulan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan.

Adapun hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh pegawai BPKAD dalam rangka meningkatkan kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara unit kerja. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD dan memberikan batasan waktu dalam hal pelaksanaan program pengelolaan keuangan dan program pengelolaan barang milik daerah
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses sertifikasi tanah

- c. Meningkatkan koordinasi internal untuk menjaga konsistensi dalam hal penyampaian laporan atau bukti-bukti pendukung untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan
- d. Memperhatikan interval waktu yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan
- e. Meningkatkan frekuensi audit internal dan eksternal untuk memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan dan memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan
- f. Peningkatan Laporan Kinerja dan Keuangan untuk memastikan bahwa laporan kinerja dan keuangan disusun dengan jelas, lengkap, dan tepat waktu

Secara umum, capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan pada Triwulan II Tahun 2025 telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan rencana strategis. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik dari aspek teknis, administratif, maupun sumber daya, yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas publik, BPKAD akan melakukan serangkaian langkah tindak lanjut secara terstruktur dan berkelanjutan. Di antaranya adalah dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan peningkatan kompetensi aparatur, menyempurnakan sistem dan mekanisme kerja, serta mengembangkan teknologi informasi yang mendukung transparansi dan efisiensi pelayanan. Selain itu, koordinasi lintas bidang dan antarperangkat daerah akan terus ditingkatkan guna menciptakan sinergi yang optimal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BPKAD juga berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kendala yang muncul di masing-masing bidang, seperti keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian administrasi, serta pengelolaan aset yang belum tertib, dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis solusi jangka panjang. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan semangat perbaikan berkelanjutan dan akuntabilitas kinerja, BPKAD Kabupaten Bangkalan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di

bidang keuangan dan aset, demi mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2025. Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Triwulan II Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah menetapkan sebanyak 1 tujuan dengan 1 indikator kinerja dan 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2025 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator kinerja yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam mencapai target tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki 2 sasaran strategis, yaitu:
- Sasaran ke-1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja pada triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut :
 - Indikator kinerja Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu belum memiliki capaian kinerja karena belum sampai pada periode pelaksanaan kegiatan.

- Indikator kinerja Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya memiliki realisasi kinerja sebesar 0,05 dari target 2,30 sehingga diperoleh capaian sebesar 197,8%
- Indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal menentukan target kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 59% sehingga sampai dengan triwulan II Tahun 2025 memperoleh nilai capaian sebesar 58,54%.
- Sasaran ke-2 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan
 - Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum memiliki nilai capaian kinerja karena belum sampai pada periode diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menetapkan target kinerja sebesar 93,00 dengan realisasi kinerja pada triwulan II Tahun 2025 sebesar 84,53 sehingga memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 91%.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp463.559.386.664,00 sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2025 mencapai Rp 233.744.996.631,00 atau 50,42% dari pagu anggaran yang ditetapkan dengan sisa pagu sebesar Rp229.814.390.033,00.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah triwulan II Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kinerja instansi.

Bangkalan, 31 Juli 2025

**Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangkalan**



AHMAT HAFID, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690131 199003 1 003